

KONSEKUENSI PERANG SHIFFIN TERHADAP KESATUAN UMAT ISLAM

Iqbal

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
Email : iqbal@stainmajene.ac.id

Received: August 05, 2025
Revised: October 15, 2025
Accepted: November 04, 2025

Abstract

The Battle of Siffin was one of the most decisive conflicts in classical Islamic history. The confrontation between Caliph 'Ali ibn Abi Talib and the Governor of Syria, Mu 'awiyah ibn Abi Sufyan, was not merely a military clash but a historical event that demands an in-depth examination of the socio-political dynamics of the Muslim community at that time. This article aims to understand the roots of the Siffin conflict, to trace the political factors underlying its emergence, and to explore how this event provides new insights into the process that led to divisions within Islamic history. This study employs a historical approach with a qualitative-descriptive analytical method. Through this approach, the paper demonstrates that the Battle of Siffin marked a crucial turning point in the transformation of political conflict into ideological and sectarian divisions within the Muslim community. The research shows how narratives of power and political legitimacy influenced the emergence of enduring social and theological fragmentation that continues to shape Muslim societies up to the contemporary era. Data for this study were obtained from various literatures relevant to the research topic. The analytical procedure involved examining the chronology of the Battle of Siffin, identifying key figures, and assessing its impacts on the course of Islamic history.

Keywords: Battle of Siffin; Ali ibn Abi Talib; Muawiyah; Political Conflict; Classical Islamic History.

Abstrak

Perang Shiffin merupakan salah satu konflik paling menentukan dalam sejarah Islam klasik. Pertempuran antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Gubernur Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan, ini bukan sekedar perang militer, tetapi peristiwa historis yang menuntut telaah mendalam terhadap dinamika sosial-politik umat Islam pada masa itu. Artikel ini bertujuan untuk memahami akar-akar munculnya konflik Perang Shiffin, menelusuri faktor-faktor politik yang melatarbelakanginya, serta mengkaji bagaimana peristiwa tersebut dapat memberikan pemahaman baru mengenai proses terbentuknya perpecahan dalam sejarah Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan metode analisis kualitatif-deskriptif. Dengan pendekatan tersebut, tulisan ini menunjukkan bahwa Perang Shiffin menjadi titik balik penting dalam transformasi konflik politik menjadi perpecahan ideologis dan sektarian dalam tubuh umat Islam. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana narasi kekuasaan

dan legitimasi politik dapat berdampak pada fragmentasi sosial dan teologis yang terus diwarisi hingga era kontemporer. Data didapatkan dari literatur-literatur yang relevan dengan judul penelitian. Prosedur analisis dilakukan dengan menelaah kronologi peristiwa Perang Shiffin, tokoh-tokoh penting serta dampaknya dalam sejarah umat Islam.

Kata Kunci: Perang Shiffin; Ali bin Abi Thalib; Muawiyah; Konflik Politik; Sejarah Islam Klasik.

Pendahuluan

Sejarah Islam pada masa awal kekhilafahan merupakan fase yang penuh dinamika, tidak hanya dalam aspek spiritual dan keilmuan, tetapi juga dalam dimensi politik dan sosial. Salah satu peristiwa penting yang menandai babak baru dalam sejarah politik Islam adalah Perang Shiffin, yakni konflik bersenjata antara Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, dan Gubernur Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan, yang terjadi pada tahun 37 H/657 M di wilayah perbatasan Sungai Eufrat.¹ Perang ini tidak hanya menjadi penanda perselisihan politik elite Muslim awal, namun juga menjadi pemicu perpecahan besar dalam tubuh umat Islam yang hingga kini dampaknya masih terasa dalam bentuk sekte dan kelompok yang berbeda secara teologis maupun ideologis.

Latar belakang terjadinya Perang Shiffin tidak dapat dipisahkan dari peristiwa sebelumnya, yakni terbunuhnya Khalifah ketiga, Utsman bin Affan oleh para pemberontak yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintahannya. Pembunuhan ini menciptakan kekacauan dan keguncangan dalam tatanan politik umat Islam. Ketika Ali diangkat menjadi khalifah, sebagian besar sahabat mendukungnya, tetapi Muawiyah menolak berbaiat dengan alasan menuntut qisas terhadap pembunuh Utsman sebelum mengakui legitimasi Ali.² Muawiyah, sebagai kerabat dekat Utsman dan pemimpin kuat di Syam, menggunakan tragedi pembunuhan Utsman sebagai alat legitimasi politik untuk menentang kekhilafahan Ali. Perselisihan ini kemudian bermuara pada konfrontasi militer terbuka di medan Shiffin.

Dalam konteks sejarah Islam, Perang Shiffin merupakan puncak dari "fitnah kubra" (fitnah besar) yang menjadi cikal bakal fragmentasi sosial dan politik di kalangan umat Islam. Fitnah ini tidak hanya memperlihatkan kompleksitas persoalan kepemimpinan pasca-wafatnya Nabi Muhammad saw. tetapi juga memperlihatkan bagaimana faktor-faktor kekuasaan dan tuntutan keadilan dapat berujung menjadi konflik yang memecah umat.³ Meskipun kedua pihak yang bertikai sama-sama berasal dari kalangan sahabat Nabi, namun pilihan politik yang mereka ambil telah membentuk basis ideologis bagi munculnya sekte-sekte dalam Islam seperti Khawarij, Syiah, dan kemudian Sunni.⁴

¹Ali Audah, *Ali Bin Abi Thalib (Sampai Kepada Hasan dan Husain)*, VII (Litera AntarNusa, 2010), h. 257.

²Audah, *Ali Bin Abi Thalib (Sampai Kepada Hasan dan Husain)*, h. 249.

³Audah, *Ali Bin Abi Thalib (Sampai Kepada Hasan dan Husain)*, h. 267.

⁴Philip K. Hitti, *History of Arabs* Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, 2nd ed. (PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010), pp. 226-29.

Pasca pertempuran Shiffin, muncul pula peristiwa tahkim (arbitrase) yang justru memperumit keadaan.⁵ Upaya damai melalui arbitrase yang diajukan oleh pihak Muawiyah dan diterima oleh Ali ternyata tidak menyelesaikan konflik, bahkan melahirkan kelompok baru, yakni Khawarij, yang keluar dari barisan Ali karena menilai bahwa tahkim adalah bentuk pembangkangan terhadap ketetapan Allah.⁶ Di sinilah benih-benih sektarianisme mulai tumbuh dalam Islam. Sementara itu, kelompok yang tetap setia kepada Ali mengembangkan keyakinan teologis tertentu yang kemudian dikenal sebagai cikal bakal Syiah Imamiyah.⁷ Di sisi lain, kelompok yang mendukung stabilitas dan mengakui kekuasaan dinasti Muawiyah kemudian berkembang menjadi bagian dari arus utama Sunni (*Ahlus Sunnah wal Jamaah*).⁸

Konflik Shiffin bukan sekadar pertarungan antara dua kubu politik, tetapi menjadi pintu masuk bagi transformasi konflik politik menjadi konflik ideologis-teologis yang berdampak jangka panjang terhadap peta umat Islam.⁹ Perpecahan ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga membentuk identitas keagamaan yang bersifat eksklusif dan sering kali berujung pada konflik antar kelompok dalam sejarah Islam berikutnya. Oleh karena itu, memahami Perang Shiffin bukan hanya penting dalam kerangka historiografi Islam, tetapi juga krusial dalam memahami akar-akar disintegrasi umat Islam dan bagaimana sejarah konflik berperan dalam pembentukan mazhab serta narasi keislaman yang beragam.

Penelitian terhadap Perang Shiffin perlu menyoroti aspek sosiologis dan politis yang melekat dalam konflik tersebut. Tidak cukup hanya memahami kronologinya, namun perlu juga ditelusuri bagaimana peristiwa ini mengubah struktur otoritas, memunculkan resistensi terhadap sistem kekhilafahan, serta menciptakan ruang bagi ideologi-ideologi keislaman yang berseberangan satu sama lain. Dalam konteks masyarakat Islam kontemporer, kajian ini menjadi sangat relevan karena banyak konflik modern yang sesungguhnya berakar pada tafsir sejarah dan identitas kelompok yang dikonstruksi dari peristiwa-peristiwa seperti Shiffin.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam konsekuensi sosial-politik Perang Shiffin terhadap kesatuan umat Islam, menggunakan pendekatan historis dengan metode analisis kualitatif-deskriptif. Dengan menelaah sumber-sumber primer klasik serta literatur modern, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan obyektif tentang bagaimana satu peristiwa sejarah dapat membentuk garis pemisah yang tajam dalam tubuh umat Islam. Di samping itu, kajian ini juga diharapkan mampu membuka ruang refleksi bagi rekonsiliasi umat melalui pemahaman sejarah secara adil dan proporsional, tanpa dikaburkan oleh fanatisme kelompok.

⁵ Audah, *Ali Bin Abi Thalib (Sampai Kepada Hasan dan Husain)*, h. 262.

⁶ Audah, *Ali Bin Abi Thalib (Sampai Kepada Hasan dan Husain)*, h. 268.

⁷ Asy-Syahrastani, *Al-Mihal Wa Al-Nihal* Terj. Asywadie Syukur (PT. Bina Ilmu Offset, 2006), h. 124.

⁸ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Muawiyah Bin Abu Sufyan* Terj. Izzudin Karimi, 1st ed. (Darul Haq, 2012), h. 245-54.

⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Metode

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti terlebih dahulu menelaah berbagai literatur yang relevan, baik berupa karya klasik seperti *al-Mihal wa al-Nihal* dan *Bidayah wa Nihayah*, maupun kajian modern yang membahas dinamika politik pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tinjauan pustaka ini berfungsi untuk memahami arah penelitian terdahulu dan menemukan celah kajian yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan historis (*historical approach*) yang berlandaskan pada disiplin ilmu sejarah peradaban Islam. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri fakta, peristiwa, dan tokoh secara kronologis guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai akar konflik serta dampak sosio-politik Perang Shiffin terhadap kesatuan umat Islam.

Adapun jenis data yang digunakan terdiri dari data primer berupa sumber-sumber sejarah klasik Islam, dan data sekunder berupa hasil penelitian modern, artikel ilmiah, serta buku-buku kontemporer terkait tema penelitian. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun, membaca, dan menelaah karya ilmiah yang relevan dari perpustakaan dan sumber digital terpercaya.

Langkah-langkah penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) pengumpulan data melalui identifikasi sumber primer dan sekunder; (2) verifikasi atau kritik sumber untuk menguji keaslian dan validitas data; (3) interpretasi atau penafsiran terhadap data dalam konteks sosial-politik masa itu; dan (4) penyusunan hasil penelitian dalam bentuk uraian analisis deskriptif yang menjelaskan kronologi, tokoh-tokoh kunci, serta dampak historis Perang Shiffin terhadap perkembangan sejarah Islam.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Perang Shiffin

Perang Shiffin adalah salah satu peristiwa paling penting dan tragis dalam sejarah Islam awal yang menandai terjadinya konflik internal berskala besar di kalangan umat Islam, terutama di antara generasi sahabat Nabi Muhammad saw. Perang ini tidak hanya berdampak pada politik kekuasaan, tetapi juga membawa konsekuensi yang jauh lebih besar, yakni perpecahan sosial, teologis, dan ideologis yang membelah umat Islam ke dalam faksi-faksi yang berseberangan.¹⁰ Untuk memahami akar konflik ini, perlu ditelusuri secara kronologis dan kontekstual peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sebelum Perang Shiffin.

Krisis yang melatarbelakangi Perang Shiffin bermula dari pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin, yang menjabat selama dua belas tahun (23-35 H). Masa awal pemerintahannya berlangsung stabil, namun memasuki paruh kedua, berbagai ketegangan mulai muncul.¹¹ Kritik terhadap Utsman semakin keras karena kebijakan politik dan administrasinya dianggap terlalu memihak kepada keluarganya dari Bani Umayyah, sehingga ia dituduh melakukan nepotisme dan mengabaikan keadilan dalam distribusi kekuasaan serta kekayaan

¹⁰Abdul Fatah, 'Perang Shiffin dan Dampaknya terhadap Perpecahan Politik Umat Islam', *Jurnal Adabiyah*, Vol. 15.No.2 (2015) <https://doi.org/https://digilib.uin-suka.ac.id/1641/?utm_>.

¹¹Muhammad Iqbal, 'Krisis Politik pada Masa Khalifah Utsman Bin Affan dan Dampaknya terhadap Konflik Umat Islam', *Analytica Islamica*, Vol. 6.No. 2 (2017).

negara.¹² Salah satu tindakan yang menimbulkan gejolak adalah pengangkatan kerabatnya seperti Al-Walid bin Uqbah, Marwan bin Hakam, dan Sa'id bin Al-Ash dalam posisi strategis di wilayah-wilayah penting seperti Kufah, Mesir, dan Syam. Ketidakpuasan masyarakat, khususnya di Kufah, Basrah, dan Mesir, meningkat akibat kesenjangan sosial dan ketidakadilan pemerintahan.¹³ Para penentang akhirnya bergerak ke Madinah dan mengepung rumah Utsman. Setelah beberapa minggu pengepungan, Utsman dibunuh dalam keadaan membaca al-Qur'an pada tahun 35 H/656 M.¹⁴ Kematian Utsman mengguncang dunia Islam dan menimbulkan dua kutub besar dalam masyarakat. Mereka yang menganggap pembunuhan Utsman sebagai bentuk revolusi terhadap kezaliman, dan mereka yang menilai peristiwa itu sebagai tindakan pemberontakan yang harus dibalas dengan qishas terhadap para pelaku.¹⁵ Situasi ini menciptakan ruang kekosongan kekuasaan dan tekanan yang besar terhadap umat Islam untuk segera menentukan pemimpin baru.

Setelah wafatnya Utsman, penduduk Madinah mendesak sahabat-sahabat utama Nabi untuk segera menunjuk pemimpin baru. Beberapa nama sempat diusulkan, namun akhirnya mayoritas kaum Muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat.¹⁶ Ali adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, dikenal karena kedekatannya dengan Rasul dan integritasnya dalam ilmu serta keadilan. Namun, situasi yang dihadapinya sangat kompleks. Ia menerima amanah kepemimpinan dalam kondisi penuh gejolak, dengan banyaknya pendukung Utsman yang marah dan desakan kuat agar segera menghukum para pembunuh Utsman.¹⁷ Ali menilai bahwa prioritas utama saat itu adalah memulihkan stabilitas negara dan mempersatukan umat yang tercerai-berai, bukan langsung melakukan qisas terhadap para pelaku pembunuhan Utsman yang jumlahnya ratusan dan berasal dari berbagai wilayah. Sebaliknya, beberapa tokoh penting seperti Thalhah, Zubair, dan Aisyah binti Abu Bakar menuntut agar para pembunuh segera dihukum. Ketegangan ini menyebabkan pecahnya Perang Jamal di Basrah, yang meskipun berakhir dengan kemenangan pihak Ali, namun memperdalam luka sosial di tengah umat Islam.¹⁸

Dalam situasi yang belum stabil tersebut, muncul penentangan yang lebih kuat dari Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam dan sepupu Utsman. Muawiyah menolak berbaiat kepada Ali dan menuntut agar para pembunuh Utsman segera diadili. Sebagai pemimpin wilayah Syam yang besar dan kuat, Muawiyah memiliki basis

¹²Muhammad Husain Haekal, *Usman Bin Affan Terj. Ali Audah*, 9th ed. (Litera AntarNusa, 2010), h. 130–44.

¹³Abdussyafi Muhammad Abdul Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah Terj. Masturi Irham dan Malik Supar*, 1st ed. (Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 36–54.

¹⁴Haekal, *Usman Bin Affan Terj. Ali Audah*, pp. 139–44.

¹⁵Syamzan Selviana, Syukur, 'Latar Belakang Terjadinya Perang Jamal dan Perang Shiffin pada Masa Ali Bin Abi Thalib', *Jurnal Global Islamika*, 3.1 (2024), 1–11 <<https://doi.org/10.5281/ZENODO.12597874>>.

¹⁶Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah Terj. Masturi Irham dan Malik Supar*, h. 89–92.

¹⁷Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah Terj. Masturi Irham dan Malik Supar*, h. 92.

¹⁸Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah Terj. Masturi Irham dan Malik Supar*, h. 93–104.

militer dan administratif yang solid, serta mampu membentuk opini publik bahwa Ali tidak serius membela darah Utsman. Ia bahkan mengangkat kain yang berlumuran darah Utsman sebagai simbol perjuangan untuk menuntut keadilan.¹⁹ Bagi Muawiyah, penolakan terhadap Ali tidak hanya didasarkan pada motif qisas, tetapi juga strategi politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia secara *de facto* telah menjalankan kekuasaan semi-otonom di wilayah Syam, dan pengakuan terhadap Ali sebagai khalifah berarti melepaskan kekuatan politik yang telah dibangunnya.²⁰ Ketegangan antara kedua pemimpin ini akhirnya memuncak pada persiapan militer terbuka. Ali yang memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Kufah mengorganisir pasukannya, sementara Muawiyah juga menggerakkan tentaranya dari Damaskus.²¹

Perang Shiffin dan Titik Kritis Disintegrasi

Pertempuran akhirnya pecah di suatu tempat bernama Shiffin, yang terletak di antara Kufah dan Damaskus, di tepi Sungai Eufrat. Kedua pasukan bertemu pada bulan Shafar tahun 37 H (Juli 657 M).²² Pada awalnya, Ali mengirim seorang delegasi yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali.²³ dengan membawa sepucuk surat. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa kaum Muhajirin dan Anshar telah membaiat Ali, maka Muawiyah harus patuh dan bergabung dengan mereka. Namun demikian, diplomasi ini berakhir dengan kegagalan karena Muawiyah menolak dan tetap menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan.²⁴ Posisi Muawiyah pun semakin kuat atas dukungan penduduk Syam yang sangat patuh padanya. Ia pun menghamparkan sisa-sisa pakaian Utsman dihadapan penduduk Syam agar mereka semakin bersedih atas kematian Utsman dan bersemangat untuk menuntut balas atas kematianya.²⁵ Penduduk Syam bersumpah untuk tidak menyentuh istri mereka dan tidak tidur di atas ranjang sebelum para pembunuh Utsman dibunuh atau siapapun yang menghalangi tuntutan tersebut.²⁶

Setelah terjadi komunikasi melalui surat antara Ali dan Muawiyah selama tiga bulan dan menemui kebuntuan, maka Ali pun bertekad untuk memerangi orang-orang Syam. Ali lalu menulis kepada Qais bin Sa'ad di Mesir untuk mengajak orang-orang bergabung bersamanya, juga menulis kepada Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, dan juga

¹⁹Ibnu Katsir, *Bidayah Wa Nihayah Terj. Asmuni* (Pustaka Azzam, 2014), h. 343.

²⁰Fitri Rahayu, Afrizal Afrizal, and Syawaluddin Syawaluddin, 'Transformasi Politik Pasca Khalifahan: Studi Atas Peran Muawiyah Ibn Abi Sofyan dalam Pembentukan Dinasti', *AL-USWAH: Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Agama Islam*, 8.1 (2025), 1-10 <<https://doi.org/10.24014/AU.V8I1.37324>>.

²¹Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah Terj. Masturi Irham dan Malik Supar*, h. 105.

²²Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah Terj. Masturi Irham dan Malik Supar*, h. 107.

²³Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah Terj. Masturi Irham dan Malik Supar*, h. 105.

²⁴Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah Terj. Masturi Irham dan Malik Supar*, h. 105.

²⁵Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah Terj. Masturi Irham dan Malik Supar*, h. 105.

²⁶Ash-Shalabi, *Muawiyah Bin Abu Sufyan Terj. Izzudin Karimi*, h. 167.

menulis kepada Utsman bin Hunaif di Bashrah. Ali kemudian berorasi di hadapan masyarakat dan mendorong mereka untuk berperang.²⁷ Ali bin Abi Thalib pun berangkat dari Kufah dengan maksud menguasai negeri Syam. Beliau pun menyiapkan pasukannya di Nukhailah (tempat yang letaknya berada di sekitar Kufah menuju Syam). Ia pun menugaskan Abu Mas'ud Uqbah bin Amru al-Badri al-Anshari sebagai amir sementara di Kufah. Kabar itupun akhirnya sampai ke telinga Muawiyah bahwa Ali telah bergerak bersama pasukannya menuju Syam. Seketika itu, Muawiyah berbincang dengan Amr bin Ash dan menyarankan agar Muawiyah juga keluar bersama pasukannya. Setelah itu, Amr tampil dan menyerukan agar penduduk Syam memerangi orang yang telah membunuh Utsman bin Affan.²⁸

Akhirnya dalam waktu singkat, pasukan Syam pun mulai bergerak menuju sungai Eufrat sambil membawa panji-panji amir mereka. Sementara itu, Ali bin Thalib pun bergerak bersama pasukannya dari Nukhailah menuju negeri Syam. Ali pun mengutus pasukan sebanyak delapan ribu pasukan dibawah pimpinan Ziyad bin an-Nadhar al-Haritsi menuju garis depan peperangan dan diikuti juga oleh Syuraih bin Hani' Bersama empat ribu pasukan. Mereka berangkat dengan jalur berbeda dengan Ali bin Abi Thalib.²⁹ Sementara itu Ali dan pasukannya terus melanjutkan perjalanan hingga melalui sungai Tigris dan melewati jembatan Manbij. Setelah dua kelompok pasukan Ali dibawah pimpinan Ziyad bin an-Nadhar al-Haritsi dan Syuraih bin Hani' sampai ditujuan, terdengar berita bahwa pasukan Muawiyah telah keluar bersama pasukannya hendak bertemu dengan Ali bin Abi Thalib.³⁰ Sebenarnya, mereka ingin menyambut pasukan Muawiyah, namun karena jumlah mereka lebih sedikit, maka mereka memutuskan untuk berputar arah dan berusaha menyeberang dari arah Anat. Di sana, terdapat benteng yang kokoh yang dapat mereka pergunakan. Namun penduduk Anat tidak memperbolehkan mereka melintas, sehingga mereka pun berbelok arah dan terpaksa menyeberang melalui Hiet hingga dapat menyusul pasukan Ali bin Abi Thalib. Merekapun meminta maaf kepada Ali atas peristiwa tersebut dan Ali pun memaafkannya.³¹

Akhirnya, kedua pasukan tersebut pun bertemu di Shiffin dan berperang selama tujuh hari. Selama berperang, mereka lebih menerapkan strategi bertahan dibanding menyerang, sehingga hasil perang tersebut tidak menunjukkan pihak yang menang dan pihak yang kalah.³² Oleh karena itu, mereka akhirnya bernegosiasi dalam rangka mengakhiri konflik yang berkepanjangan tersebut. Mereka pun bersepakat untuk mengangkat juru runding masing-masing di antara mereka. Peristiwa ini kemudian disebut dengan peristiwa Tahkim (*arbitrase*). Dalam perundingan tersebut, Muawiyah menunjuk Amr bin Ash sebagai perwakilannya, sementara pihak Ali

²⁷Ash-Shalabi, *Muawiyah Bin Abu Sufyan Terj. Izzudin Karimi*, h. 176-77.

²⁸Yat Rospia Brata, 'Perang Shiffin', *Jurnal Artefak*, 3.1 (2015), h. 85-95.

²⁹Brata, 'Perang Shiffin', h. 87.

³⁰Ahmad Sumari, Nur Ainul Basyirah Alias Jabatan Pengajian Islam, and Fakulti Sains Kemanusiaan, 'Isu dan Kontroversi Perang Jamal dan Perang Siffin: Suatu Tinjauan Literatur', *AL MAKRIFAH Journal of Knowledge and Learning in Islamic Tradition and Culture*, 3.1 (2025), 44-53 <<https://doi.org/10.37134/ALMAKRIFAH.VOL3.1.4.2025>>.

³¹Brata, 'Perang Shiffin', h. 87.

³²Brata, 'Perang Shiffin', h. 90.

menunjuk Abu Musa Al-Asy'ari. Perundingan pun terjadi di antara dua perwakilan tersebut yang pada hasilnya merugikan pihak Ali. Amr bin Ash dengan kecerdikannya mengajak Abu Musa untuk meletakkan kedua jabatan yang dipegang Ali dan Muawiyah. Ali meletakkan jabatannya sebagai khalifah dan Muawiyah meletakkan jabatannya sebagai gubernur Syam. Abu Musa sepakat dengan hal tersebut dan meletakkan jabatan Ali sebagai Khalifah. Namun diluar dugaan, Amr bin Ash justru mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah selanjutnya setelah peletakan jabatan khalifah oleh Ali bin Abi Thalib. Abu Musa al-Asy'ari merasa tertipu atas tipu muslihat Amr bin Ash. Perundingan tersebut berakhir tanpa adanya keputusan yang jelas di antara mereka, sehingga hal ini lebih menguntungkan pihak Muawiyah dan merugikan pihak Ali sebagai khalifah sah.³³

Setelah perundingan itu selesai, muncullah kelompok yang tidak senang terhadap proses tahkim tersebut. Mereka pada awalnya adalah kelompok yang berada di pihak Ali. Namun karena tidak puas atas peristiwa tahkim, mereka pun keluar dari barisan Ali karena menganggap bahwa tidak seharusnya perundingan itu terjadi dan merugikan pihak Ali. Apalagi pihak Muawiyah menggunakan Alquran sebagai simbol perdamaian yang sebenarnya hanya merupakan taktik politik kelompok Muawiyah agar dapat menghentikan perang di antara mereka. Mereka berpandangan bahwa baik Ali maupun Muawiyah serta pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tahkim seperti Amr bin Ash dan Abu Musa al-Asy'ari harus dibunuh karena telah mempermudah Alquran. Golongan inilah yang dalam catatan sejarah disebut Khawarij. Mereka pun menyusun strategi untuk membunuh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tahkim tersebut. Meskipun yang ditargetkan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Ash, Abu Musa Al-Asy'ari dan Ali bin Abi Thalib, namun yang terbunuh hanya Ali bin Abi Thalib saja. Ali pun terbunuh pada tanggal 17 Ramadhan tahun ke-40 H. Adapun yang ketiga orang yang lain tidak berhasil dibunuh karena beberapa faktor. Muawiyah saat subuh hari di tanggal terbunuhnya Ali, tidak keluar rumah, sementara Amr bin Ash sedang sakit sehingga tidak berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah dan Abu Musa Al-Asy'ari yang tidak diketemukan arah rimbanya setelah peristiwa tahkim terjadi. Demikian peristiwa Perang Shiffin terjadi di kalangan umat Islam yang akhirnya berujung pada perpecahan umat Islam pasca Perang Shiffin terjadi.

Kondisi Sosio-Politik Umat Islam pasca Perang Shiffin

Perang Shiffin (657 M/37 H) bukan hanya perang fisik antara dua kelompok Muslim yang berbeda pandangan, tetapi juga titik balik dalam dinamika politik Islam yang mengarah pada perpecahan teologis dan ideologis.³⁴ Setelah pertempuran berakhir tanpa kemenangan jelas, situasi politik umat Islam mengalami transformasi besar yang berakibat jangka panjang terhadap persatuan umat dan arah perkembangan sejarah Islam.

Setelah pertumpahan darah yang begitu dahsyat di Shiffin, kedua belah pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan menyetujui diadakannya tahkim

³³Badri Yatim, *Sejarah Politik Islam: dari Perang Shiffin Hingga Fitnah Besar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000).

³⁴Misbahuddin and Usman Nomay, *Sejarah Islam Klasik (571-1258 M)* (Jakarta: Sejahtera Kita, 2021).

(arbitrase).³⁵ Namun keputusan ini justru menjadi awal dari fragmentasi internal. Ali, meskipun secara politik ditekan oleh sebagian pasukannya untuk menerima tahtkim, sebenarnya melihatnya sebagai taktik licik Muawiyah untuk menunda kekalahan dan melemahkan otoritasnya. Kekhawatiran ini terbukti benar, sebab dalam proses tahtkim, utusan dari kubu Ali (Abu Musa al-Asy'ari) dan dari pihak Muawiyah (Amr bin Ash) gagal mencapai kesepakatan yang menguntungkan Ali. Bahkan, manipulasi yang dilakukan oleh Amr bin Ash menyebabkan hasil tahtkim tampak seolah-olah menggugurkan legitimasi kekhilafahan Ali dan membuka jalan bagi Muawiyah untuk menuntut kekuasaan. Akibat dari hal ini, muncul kelompok Khawarij, yakni mantan pendukung Ali yang kecewa terhadap kebijakan Ali menerima tahtkim.³⁶ Mereka menganggap tahtkim sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah swt. karena menurut mereka, urusan hukum hanya milik Allah semata: "*La hukma illa lillah*". Khawarij kemudian memisahkan diri dan menganggap Ali, Muawiyah, serta orang-orang yang terlibat dalam tahtkim sebagai kafir dan harus diperangi. Kelompok ini menjadi kekuatan radikal pertama dalam Islam yang menempuh kekerasan demi menegakkan keyakinannya.

Pasca Perang Shiffin, posisi Ali sebagai khalifah semakin terancam. Ia tidak hanya kehilangan sebagian loyalis karena pecahnya kelompok Khawarij,³⁷ tetapi juga kehilangan kepercayaan dari sebagian masyarakat Muslim yang mulai meragukan keputusannya dalam menerima tahtkim. Kekuasaan Ali hanya efektif di wilayah Irak dan sebagian wilayah Persia, sementara wilayah Syam berada di bawah kekuasaan penuh Muawiyah. Ketika konflik dengan Khawarij berlanjut, Ali harus menghadapi perang baru di Nahrawan (38 H),³⁸ yang semakin menguras energinya dan melemahkan otoritasnya. Di sisi lain, Muawiyah memanfaatkan situasi tersebut untuk mengkonsolidasikan kekuatannya di Syam dan memperluas pengaruhnya ke wilayah lain secara perlahan. Pada tahun 40 H (661 M), Ali dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam saat sedang salat di Masjid Kufah.³⁹ Kematian Ali mengakhiri kekhilafahan Khulafa al-Rasyidin dan membuka babak baru: kekuasaan berbasis dinasti.

Setelah Ali wafat, putranya Hasan bin Ali dibaiat sebagai khalifah oleh sebagian kaum Muslimin di Kufah. Namun karena kekuatan militer dan politik yang tidak seimbang dengan Muawiyah, serta untuk menghindari perang lanjutan, Hasan memilih untuk melakukan perjanjian damai dengan Muawiyah pada tahun yang sama (661 M).⁴⁰ Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dengan syarat tidak menjadikan kekhilafahan sebagai warisan dinasti. Namun setelah Muawiyah berkuasa, ia

³⁵Ahmad Al-Usairy, *Al-Tarikhu Islam* Terj. H. Samson Rahman, *Sejarah Islam*, 11th ed. (Akbar Media, 2012), h. 175.

³⁶Al-Usairy, *Al-Tarikhu Islam* Terj. H. Samson Rahman, *Sejarah Islam*, h. 176.

³⁷Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah* Terj. Masturi Irham dan Malik Supar, h. 115.

³⁸Al-Usairy, *Al-Tarikhu Islam* Terj. H. Samson Rahman, *Sejarah Islam*, h. 176.

³⁹Audah, *Ali Bin Abi Thalib (Sampai Kepada Hasan dan Husain)*, h. 339–240.

⁴⁰Al-Usairy, *Al-Tarikhu Islam* Terj. H. Samson Rahman, *Sejarah Islam*, h. 177.

mendirikan dinasti Umayyah dan menobatkan anaknya, Yazid, sebagai penerus.⁴¹ Ini menjadi preseden lahirnya sistem kerajaan dalam kekhalifahan Islam.

Dengan naiknya Muawiyah sebagai khalifah pertama dari dinasti Umayyah, umat Islam memasuki era kekuasaan politik yang terpusat, tetapi kehilangan nilai-nilai *syura* (musyawarah) dan keadilan sosial yang menjadi prinsip utama pada masa Khulafa al-Rasyidin. Pemerintahan berubah dari model khalifah yang dipilih umat menjadi raja yang ditunjuk keturunannya, sehingga memicu gelombang resistensi dari berbagai kalangan, terutama para pendukung Ali (kelak dikenal sebagai Syiah) dan para penentang dinasti secara umum.

Pasca Perang Shiffin dan dinamika yang mengikutinya, umat Islam mulai mengalami pembelahan ideologis:

1. Kubu pendukung Muawiyah kemudian berkembang menjadi arus utama Sunni, yang menerima kekuasaan Umayyah meskipun dalam banyak hal mengkritik cara mereka memerintah. Sunni mengutamakan stabilitas politik dan menerima pemimpin selama masih Muslim dan mampu menjaga ketertiban.
2. Pendukung Ali dan keluarganya (*Ahlul Bait*) merasa kekuasaan telah direbut secara tidak sah. Mereka percaya bahwa hanya keturunan Nabi yang berhak memimpin umat. Kelompok ini kemudian menjadi cikal bakal aliran Syiah, yang berkembang dengan teologi dan sistem imamah tersendiri.
3. Khawarij menjadi kelompok ekstrem yang menolak kepemimpinan baik Ali maupun Muawiyah, dan menilai bahwa kekuasaan harus diberikan kepada siapa saja yang paling saleh, bahkan dari kalangan budak sekalipun, serta bersikap keras terhadap siapa pun yang dianggap menyimpang.

Fragmentasi ini tidak hanya berlangsung dalam aspek politik, tetapi juga berkembang dalam bidang teologi, hukum Islam (*fiqh*), dan pandangan terhadap sejarah. Perpecahan ini bertahan hingga kini, menjadi warisan yang terus membayangi hubungan antar mazhab dalam dunia Islam.

Munculnya Khawarij dan Dinamika Ideologi Ekstrem

Khawarij, secara harfiah berarti "mereka yang keluar", awalnya merupakan bagian dari pasukan Ali bin Abi Thalib yang kecewa dan kemudian memisahkan diri setelah peristiwa tahkim (arbitrase) antara Ali dan Muawiyah.⁴² Mereka menilai bahwa Ali telah melakukan kesalahan fatal karena menyerahkan urusan hukum kepada manusia, padahal menurut mereka, hanya Allah yang berhak menetapkan hukum. Prinsip utama yang mereka pegang adalah "*la hukma illa lillah*" (tidak ada hukum kecuali hukum Allah).⁴³

Mereka menganggap bahwa menerima arbitrase berarti tunduk pada hukum manusia, dan oleh karena itu, Ali dianggap telah menyimpang dari prinsip Islam sejati. Dari sinilah lahir doktrin utama Khawarij yang ekstrem: bahwa setiap Muslim yang

⁴¹Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah* Terj. Masturi Irham dan Malik Supar, h. 165.

⁴²Muhammad Sabli, 'Aliran-Aliran Teologi dalam Islam (Perang Shiffin dan Implikasinya Bagi Kemunculan Kelompok Khawarij dan Murjiah)', *Nur El Islam*, 2.1 (2015), 105-12 <<https://media.neliti.com/media/publications/226415-aliran-aliran-teologi-dalam-islam-perang-3369cd4a.pdf>>.

⁴³Asy-Syahrastani, *Al-Mihal Wa Al-Nihal* Terj. Asywadie Syukur, h. 102.

melakukan dosa besar telah keluar dari Islam (kafir), dan bahwa kekuasaan hanya boleh dipegang oleh orang yang benar-benar saleh, tanpa memandang keturunan, status sosial, atau kekayaan.⁴⁴

Khawarij juga menolak konsep legitimasi politik berbasis kekeluargaan atau suku, dan mempromosikan pandangan egaliter dalam memilih pemimpin. Namun, meskipun mereka menyuarakan keadilan dan ketakwaan, mereka justru terjebak dalam ideologi kekerasan dan intoleransi. Mereka tidak segan membunuh orang-orang yang berbeda pandangan, termasuk sahabat Nabi, jika dianggap tidak sejalan dengan pemahaman mereka.⁴⁵

Kelompok ini juga dikenal sangat fanatik dalam menerapkan ajaran Islam versi mereka, hingga menimbulkan ketakutan dan keresahan di tengah masyarakat. Dalam sejarah, mereka melakukan aksi-aksi pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting, termasuk upaya pembunuhan terhadap Ali, Muawiyah, dan Amr bin Ash secara bersamaan. Dari ketiganya, hanya Ali yang berhasil mereka bunuh.⁴⁶

Secara ideologis, Khawarij mewakili bentuk ekstremisme dini dalam Islam. Mereka menjadi prototipe bagi gerakan-gerakan radikal di kemudian hari yang menggunakan dalil agama untuk membenarkan aksi kekerasan. Walau sebagian besar pengaruh mereka telah hilang, ideologi mereka tetap menjadi perhatian penting dalam studi keislaman kontemporer, karena nilai-nilai intoleransi dan takfir yang mereka wariskan masih muncul dalam kelompok-kelompok radikal modern.⁴⁷

Dengan demikian, munculnya Khawarij bukan hanya merupakan reaksi terhadap peristiwa politik, tetapi juga mencerminkan transformasi teologis menuju pemahaman Islam yang rigid, eksklusif, dan konfrontatif. Dinamika ini telah meninggalkan jejak panjang dalam sejarah pemikiran Islam, dan menjadi pelajaran penting tentang bagaimana konflik politik dapat melahirkan ideologi keagamaan yang ekstrem.

Dampak Sosial, Politik dan Teologis Perang Shiffin

Perang Shiffin yang terjadi pada tahun 37 H/657 M merupakan salah satu peristiwa paling penting dan tragis dalam sejarah Islam.⁴⁸ Perang ini bukan sekadar konflik militer antara dua pemimpin besar umat Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, tetapi juga menjadi pemicu utama munculnya perpecahan sosial, krisis politik, dan transformasi teologis yang berdampak panjang dalam tubuh umat Islam. Perang ini menandai fase transisi dari masa Khulafa al-Rasyidin yang berbasis musyawarah menuju era kekuasaan dinasti yang berbasis kekuatan politik.

⁴⁴ Asy-Syahrastani, *Al-Mihal Wa Al-Nihal* Terj. Asywadie Syukur, h. 103.

⁴⁵ Asy-Syahrastani, *Al-Mihal Wa Al-Nihal* Terj. Asywadie Syukur, h. 103.

⁴⁶ Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah* Terj. Masturi Irham dan Malik Supar, h. 129-30.

⁴⁷ Sulastri, ‘Konsep Pemahaman Aqidah Khawarij dari Zaman Ke Zaman’, *Maslahah: Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2022), 103-11 <<https://jurnalsains.id/index.php/maslahah/article/view/51>>.

⁴⁸ Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah* Terj. Masturi Irham dan Malik Supar, h. 107.

Dampak Sosial

Perang Shiffin membawa dampak sosial yang sangat luas bagi masyarakat Islam awal. Salah satu dampak utamanya adalah keretakan dalam struktur sosial umat Islam yang sebelumnya relatif bersatu. Konflik ini telah menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat, terutama antara mereka yang mendukung Ali dan mereka yang berpihak kepada Muawiyah. Bahkan, banyak kalangan yang memilih bersikap netral tetapi tetap berdampak secara sosial akibat ketegangan yang terjadi.

Pertama, solidaritas sosial yang dibangun pada masa Nabi Muhammad saw. dan dilanjutkan oleh tiga khalifah sebelumnya mulai terkikis. Umat Islam yang sebelumnya memiliki semangat persaudaraan dalam ikatan keimanan, mulai terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling mencurigai. Masing-masing kelompok memiliki narasi kebenaran sendiri, sehingga memperuncing perbedaan dan menciptakan segregasi sosial.

Kedua, perang ini memunculkan krisis kepercayaan terhadap para tokoh sahabat Nabi. Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan keputusan-keputusan politik para sahabat yang terlibat dalam konflik. Hal ini menyebabkan tumbuhnya skeptisme terhadap otoritas keagamaan tradisional yang sebelumnya diterima secara mutlak.

Ketiga, trauma sosial akibat perang antara sesama Muslim, khususnya sesama sahabat Nabi, menciptakan luka kolektif yang dalam. Keluarga-keluarga kehilangan anggota mereka dalam pertempuran, dan masyarakat menjadi terbelah secara emosional. Trauma ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari memori sosial umat Islam.⁴⁹

Dampak Politik

Secara politik, Perang Shiffin merupakan titik balik yang sangat penting. Salah satu dampak utamanya adalah berakhirnya sistem pemilihan khalifah berdasarkan musyawarah (*syura*), dan bergantinya dengan sistem kekuasaan berbasis warisan dinasti. Setelah terbunuhnya Ali dan pengunduran diri Hasan bin Ali, Muawiyah mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Dinasti Umayyah, yang menjadi bentuk kekuasaan turun-temurun pertama dalam sejarah Islam.

Pertama, legitimasi politik umat Islam mengalami pergeseran. Sebelumnya, kekuasaan didasarkan pada keutamaan agama, kedekatan dengan Rasulullah, dan proses musyawarah umat. Namun setelah Perang Shiffin, kekuasaan mulai ditentukan oleh kekuatan militer dan kepentingan politik. Muawiyah, dengan basis kekuatan di Syam dan dukungan administratif yang kuat, mampu mengkonsolidasikan kekuasaannya.

Kedua, munculnya praktik politisasi agama yang sangat kuat. Dalam Perang Shiffin, Muawiyah menggunakan simbol-simbol religius seperti baju berdarah Utsman dan mushaf yang diangkat di ujung tombak sebagai alat propaganda untuk mendapatkan dukungan politik. Strategi ini menjadi preseden bagi praktik-praktik manipulasi agama dalam politik Islam selanjutnya.

Ketiga, terjadinya delegitimasi terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib melalui proses tahlkim yang kontroversial. Arbitrase antara Amr bin Ash dan Abu Musa

⁴⁹Muhsin Hariyanto and Mahfud Khoirul Amin, 'Muslim Political Dynamics Post-Tahkim: A Case Study of the Shiffin War', *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5.9 (2024), 3782-92 <<https://doi.org/10.59141/jist.v5i9.1734>>.

al-Asy'ari yang berakhir dengan pengakuan terhadap Muawiyah sebagai pemimpin, memperlemah posisi Ali di mata sebagian umat. Hal ini memperburuk instabilitas politik dan memperbesar fragmentasi kekuasaan.

Keempat, perang ini menciptakan preseden buruk dalam politik Islam. Kekuasaan tidak lagi dilihat sebagai amanah untuk menegakkan keadilan, tetapi sebagai alat perebutan pengaruh. Konflik antara Ali dan Muawiyah membuka jalan bagi munculnya elite-elite politik yang lebih mengedepankan kepentingan kekuasaan daripada persatuan umat.

Dampak Teologis

Dampak teologis dari Perang Shiffin sangat mendalam dan berjangka panjang. Perang ini menjadi awal mula lahirnya berbagai aliran dalam Islam yang tidak hanya berbeda dalam aspek politik, tetapi juga dalam doktrin keimanan dan teologi. Tiga aliran besar yang muncul dari konteks ini adalah Khawarij, Syiah, dan Sunni.⁵⁰

Pertama, Khawarij adalah kelompok ekstrem yang awalnya merupakan pendukung Ali tetapi kemudian menolak kepemimpinannya setelah peristiwa tahkim. Mereka menganggap bahwa Ali telah berhukum kepada manusia (*tahkim*) dan bukan kepada Allah, yang bertentangan dengan prinsip "*la hukma illa lillah*" (tiada hukum selain hukum Allah). Pandangan teologis Khawarij sangat keras: mereka menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir dan melegitimasi kekerasan untuk menegakkan keyakinan mereka.⁵¹

Kedua, Syiah lahir sebagai bentuk kesetiaan kepada Ali dan *Ahlul Bait*. Kelompok ini mengembangkan konsep imamah, yaitu bahwa kepemimpinan umat Islam seharusnya berada di tangan keturunan Nabi yang maksum. Pandangan ini tidak hanya berakar pada kecintaan kepada Ali, tetapi juga merupakan bentuk resistensi terhadap dominasi politik dinasti Umayyah. Teologi Syiah berkembang dengan kerangka yang sangat berbeda dari Sunni, terutama dalam hal kepemimpinan dan otoritas keagamaan.⁵²

Ketiga, kelompok yang menerima hasil tahkim dan mendukung stabilitas kekuasaan dikenal sebagai *Ahlus Sunnah wal Jamaah*. Kelompok ini kemudian berkembang menjadi arus utama dalam dunia Islam. Mereka menekankan pentingnya kesatuan umat, menerima kepemimpinan siapa pun selama Muslim dan mampu menjaga stabilitas, serta mengembangkan doktrin yang lebih fleksibel terhadap perbedaan politik.⁵³

Keempat, perbedaan teologis ini berlanjut pada perbedaan dalam bidang fikih, tafsir, dan ushuluddin. Munculnya aliran-aliran ilmu kalam seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah tidak lepas dari dinamika teologis pasca-Perang Shiffin. Perdebatan tentang iman, kufur, takdir, dan keadilan ilahi menjadi tema-tema sentral dalam perkembangan teologi Islam selanjutnya.⁵⁴

⁵⁰ M. Abdul. Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Pustaka Book Publisher, 2007).

⁵¹ Asy-Syahrastani, *Al-Mihal Wa Al-Nihal* Terj. Asywadie Syukur, h. 102.

⁵² Asy-Syahrastani, *Al-Mihal Wa Al-Nihal* Terj. Asywadie Syukur, h. 124.

⁵³ Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah* Terj. Masturi Irham dan Malik Supar, h. 133-34.

⁵⁴ M. Amin Nurdin M., *Sejarah Pemikiran Islam* (Amzah, 2011), h. 7-10.

Kelima, dampak teologis Perang Shiffin juga terlihat dari berkembangnya wacana takfir (pengkafiran), yang hingga kini masih menjadi isu sensitif dalam dunia Islam. Penggunaan label kafir terhadap sesama Muslim yang berbeda pandangan politik atau teologis menjadi warisan dari konflik-konflik awal seperti Perang Shiffin.⁵⁵ Ini menunjukkan bahwa dimensi teologis dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah konflik politik.

Relevansi Kontemporer dan Implikasi Keummatan dari Perang Shiffin Akar Historis Perpecahan Mazhab

Perang Shiffin adalah akar sejarah yang melahirkan perbedaan mazhab dan aliran dalam Islam. Konflik antara Ali dan Muawiyah bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang legitimasi kepemimpinan dan keadilan sosial. Ketegangan ini berkembang menjadi konflik ideologis yang menimbulkan tiga arus besar: Sunni, Syiah, dan Khawarij.⁵⁶

Di era modern, perbedaan antara mazhab Sunni dan Syiah masih menjadi sumber ketegangan, baik secara teologis maupun politik. Misalnya:

1. Konflik geopolitik antara Iran (Syiah) dan Arab Saudi (Sunni) sering kali membawa narasi sektarian ke dalam konflik regional.
2. Di beberapa negara, seperti Irak, Suriah, Yaman, dan Lebanon, benturan antara kelompok Sunni dan Syiah bukan hanya soal doktrin, tetapi juga perebutan pengaruh politik dan ekonomi.

Dengan memahami Perang Shiffin, umat Islam masa kini dapat menelusuri akar perpecahan ini dan menyadari bahwa perbedaan mazhab tidak perlu menjadi alasan untuk saling membenci, karena konflik awal itu sendiri sarat dengan nuansa politik, bukan hanya agama.

Bahaya Politisasi Agama

Salah satu warisan negatif dari Perang Shiffin adalah penggunaan simbol agama untuk tujuan politik. Muawiyah menggunakan mushaf yang diangkat di ujung tombak dan pakaian berdarah Utsman sebagai alat legitimasi perjuangannya. Ini adalah bentuk politisasi agama yang pertama kali tercatat dalam sejarah Islam.

Fenomena ini terus berulang hingga hari ini yakni:

1. Partai politik di dunia Muslim sering menggunakan slogan atau simbol keagamaan untuk menarik dukungan, tanpa komitmen pada nilai-nilai Islam secara substantif.
2. Kelompok radikal kerap membungkus agenda kekerasan mereka dengan dalil-dalil agama, padahal motivasinya seringkali bersifat politis.

Relevansi bagi umat Islam saat ini adalah pentingnya menyadari dan membedakan antara nilai agama yang murni dan kepentingan politik yang berkedok agama. Umat perlu lebih cermat dalam menyikapi wacana keagamaan di ruang publik agar tidak terjebak dalam propaganda.

⁵⁵ Muhammad Samman Dasuki, Akhmad, 'Tafsir Ekatre Kaum Khawarij Ketika Ayat Suci Dijadikan Alat Takfir', *Journal Sains Student Research*, 3.4 (2025), 158-70 <<https://doi.org/10.61722/JSSR.V3I4.5261>>.

⁵⁶ Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam* (Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013).

Ekstremisme dan Ideologi Khawarij Modern

Khawarij sebagai produk dari kekecewaan pasca Perang Shiffin adalah contoh paling awal dari radikalisme dalam Islam. Mereka menerapkan tafsir tekstualis, eksklusif, dan menggunakan kekerasan untuk memberantas apa yang mereka anggap sebagai kebatilan. Hari ini, warisan ideologi Khawarij masih terasa dalam bentuk kelompok ekstrem seperti ISIS dan Al-Qaeda.

Kelompok-kelompok ini menggunakan pendekatan takfiri (mengkafirkan orang Islam lain), menolak otoritas ulama, dan menghalalkan darah sesama Muslim atas dasar perbedaan pandangan. Implikasinya adalah perlunya pendidikan agama yang moderat, serta penguatan pendekatan *wasathiyah* (jalan tengah) untuk menangkal ideologi kekerasan.⁵⁷ Pemahaman terhadap Khawarij sebagai pelajaran sejarah sangat penting dalam membangun narasi damai di tengah umat.

Krisis Kepemimpinan Umat dan Fragmentasi Sosial

Pasca Perang Shiffin, umat Islam kehilangan satu kepemimpinan tunggal yang diterima secara kolektif. Konflik terus terjadi setelahnya dan menyebabkan umat terpecah dalam kekuasaan politik yang saling bersaing. Dalam konteks kontemporer, terdapat beberapa hal yang perlu kita cermati yaitu:

1. Umat Islam kini tidak memiliki otoritas pemersatu tunggal di tingkat global. Tidak ada satu pun otoritas yang benar-benar mampu menjadi rujukan semua pihak.
2. Fragmentasi sosial di kalangan umat terjadi karena loyalitas kepada kelompok, ormas, atau mazhab lebih dominan daripada loyalitas kepada ukhuwah Islamiyah.

Implikasinya yakni dibutuhkan upaya serius untuk membangun kesadaran kolektif lintas mazhab dan ormas, melalui dialog, kerja sama, dan penyusunan agenda bersama untuk kemajuan umat.

Urgensi Rekonsiliasi dan Moderasi Beragama

Salah satu pelajaran besar dari Perang Shiffin adalah pentingnya mekanisme damai dalam menyelesaikan konflik. Kegagalan tahkim saat itu bukan karena negosiasi tidak diperlukan, tetapi karena tidak dilakukan dengan niat tulus dan tanpa aturan main yang adil. Pelajaran ini sangat relevan bagi dunia Islam saat ini, di mana konflik internal baik di level lokal maupun internasional seringkali gagal diselesaikan secara dialogis. Umat Islam harus mulai membangun budaya:

1. *Tabayyun* (klarifikasi sebelum menilai)
2. *Tasāmūh* (toleransi dalam perbedaan)
3. *Islah* (rekonsiliasi dalam konflik)

Institusi pendidikan, masjid, dan media Islam perlu menjadi pionir dalam menyebarkan semangat moderasi sebagai alternatif dari ekstremisme dan intoleransi

Fragmentasi Identitas Keagamaan dan Polarisasi Sosial

Salah satu dampak jangka panjang dari Perang Shiffin adalah pembentukan identitas-identitas keagamaan yang kaku dan eksklusif. Sejak peristiwa ini, umat Islam

⁵⁷Hairul Puadi, 'Radikalisme Islam: Studi Doktrin Khawarij', JURNAL PUSAKA: Media Kajian Dan Pemikiran Islam, 4.1 (2016), 43-53 <<https://doi.org/10.35897/PS.V4I1.49>>.

tidak lagi hanya dibedakan berdasarkan pemahaman atau ijihad, tetapi telah terbagi ke dalam kategori identitas: Sunni, Syiah, Khawarij, dan seterusnya.

Dalam konteks kontemporer, fenomena ini mengalami reaktualisasi dalam bentuk seperti berikut:

1. Polarisasi sosial antara kelompok konservatif, moderat, dan liberal di internal umat.
2. Labelisasi seperti *wahabi*, *syiah rafidhah*, *liberalis*, *tradisionalis*, yang sering digunakan untuk menyerang, bukan untuk memahami.
3. Perdebatan yang semestinya akademik menjadi ajang pembunuhan karakter dan permusuhan.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya membangun paradigma *ukhuwah mazhabiyah*, yaitu kesadaran bahwa perbedaan dalam Islam adalah keniscayaan, dan tugas umat hari ini bukan menyatukan mazhab, tetapi mengelola perbedaan dengan bijak dan beradab.

Kegagalan Menyepakati Mekanisme Kekuasaan dalam Islam

Perang Shiffin mencerminkan persoalan fundamental dalam sejarah Islam yakni tidak adanya konsensus tentang sistem pemerintahan yang sah setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Apakah pemimpin harus dari *Ahlul Bait*? Apakah harus melalui *syura*? Apakah bisa diwariskan? Semua ini masih menjadi perdebatan hingga kini.

Dalam masyarakat Muslim modern, perpecahan ini tercermin dalam beberapa hal seperti:

1. Perdebatan antara sistem khilafah, demokrasi Islam, kerajaan Islam, hingga teokrasi.
2. Munculnya kelompok seperti Hizbut Tahrir yang menolak demokrasi dan menyerukan khilafah global.
3. Sementara negara-negara Muslim menjalankan sistem politik yang sangat beragam: monarki, republik, militeristik, dan sebagainya.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya perumusan fikih siyasah kontemporer (politik Islam modern) yang tidak hanya mengacu pada romantisme masa lalu, tetapi juga memperhitungkan dinamika zaman, prinsip keadilan, dan partisipasi umat.

Pelajaran tentang Kepemimpinan yang Berorientasi Umat

Perang Shiffin memperlihatkan betapa beratnya tanggung jawab pemimpin ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Ali bin Abi Thalib memilih kestabilan dan persatuan umat ketimbang pembalasan politik, walaupun akhirnya banyak pihak yang menilainya lemah secara politik. Dalam konteks saat ini, pelajaran dari Ali adalah bahwa kepemimpinan sejati dalam Islam bukan soal menang atau berkuasa, tapi menjaga kemaslahatan umat, menghindari pertumpahan darah, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta persaudaraan. Krisis kepemimpinan di banyak negara Muslim saat ini mencerminkan ketidakhadiran figur-firug yang memiliki integritas, visi keummatan, dan kesediaan untuk mendahulukan maslahat umat di atas ambisi kekuasaan.

Kebutuhan Mendalam terhadap Literasi Sejarah Islam yang Objektif

Peristiwa Perang Shiffin sering kali dikisahkan dalam versi yang sangat partisian: pro-Ali atau pro-Muawiyah, tergantung sumber yang digunakan. Dalam kondisi ini,

umat Islam hari ini menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pemahaman sejarah yang utuh, seimbang, dan bebas dari glorifikasi kelompok. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu kita pahami yaitu:

1. Umat Islam perlu diajarkan sejarah Islam secara ilmiah, kritis, dan mendalam, bukan sekadar kisah heroik.
2. Literasi sejarah ini penting untuk menghindarkan umat dari fanatisme buta terhadap tokoh atau kelompok, dan memupuk kedewasaan dalam menilai perbedaan.
3. Kurikulum pendidikan Islam di sekolah dan perguruan tinggi perlu memberikan ruang pada diskusi-diskusi sejarah yang menekankan refleksi dan pembelajaran moral, bukan pembentukan identitas eksklusif.

Urgensi Persatuan Umat di Tengah Tantangan Global

Salah satu pelajaran terbesar dari Perang Shiffin adalah bahwa ketika umat Islam terpecah, maka kekuatan eksternal lebih mudah masuk dan mengintervensi. Setelah pecahnya persatuan umat, kolonialisme Barat menjalar ke dunia Islam, dan hari ini berbagai konflik di Timur Tengah dan Afrika sering kali dimanfaatkan oleh kekuatan asing. Dengan demikian, beberapa hal yang perlu kita sadari bersama bahwa:

1. Persatuan umat bukanlah retorika kosong, melainkan kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan global: Islamofobia, krisis Palestina, krisis pengungsi, eksploitasi ekonomi, dan lainnya.
2. Umat Islam harus belajar dari sejarah bahwa perpecahan internal hanya akan membawa kerugian kolektif. Sebaliknya, persatuan tidak berarti seragam, tetapi sinergi dalam perbedaan demi maslahat yang lebih besar.

Perang Shiffin mengajarkan bahwa perbedaan pandangan dalam Islam adalah fakta sejarah yang tidak dapat dihapus. Namun, cara umat menyikapi perbedaan itulah yang menentukan apakah sejarah menjadi bahan bakar permusuhan atau sumber hikmah. Relevansi kontemporer Perang Shiffin tidak terletak pada siapa yang benar atau salah dalam konflik itu, melainkan pada bagaimana generasi Muslim hari ini bisa belajar dari kesalahan masa lalu untuk membangun masa depan Islam yang lebih bersatu, cerdas, dan berkeadaban.

Kesimpulan

Perang Shiffin adalah peristiwa besar yang menjadi titik balik dalam sejarah Islam awal, yang secara nyata mencerminkan betapa kompleks dan rapuhnya dinamika sosial-politik umat Islam pasca wafatnya Rasulullah saw. Konflik ini tidak hanya berakar pada sengketa kepemimpinan setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, tetapi juga melibatkan dimensi yang lebih dalam seperti tuntutan keadilan, legitimasi kekuasaan, dan tarik-menarik kepentingan antara berbagai kelompok politik dan militer yang muncul dalam masa transisi kekhalifahan.

Pertempuran antara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah dan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin wilayah Syam mencerminkan belum adanya konsensus dalam mekanisme pemilihan dan pengalihan kekuasaan dalam masyarakat Muslim saat itu. Ketika proses arbitrase (*tahkim*) yang seharusnya menjadi jalan keluar justru menimbulkan kekecewaan dan fragmentasi internal, hal ini mengakibatkan lahirnya kelompok Khawarij dan semakin meluasnya konflik antarumat Islam.

Dampak sosio-politik dari Perang Shiffin sangat besar dan jangka panjang. Di satu sisi, legitimasi kekhilifahan Ali melemah dan kepercayaan publik terhadap para elite politik Islam mulai runtuh. Di sisi lain, Muawiyah justru memperkuat posisinya di Syam dan kelak berhasil mendirikan Dinasti Umayyah, menjadikan kekuasaan Islam bergeser dari sistem khilafah yang berdasarkan musyawarah menjadi bentuk monarki turun-temurun. Perpecahan ini menandai awal munculnya faksi-faksi teologis dan politik seperti Sunni, Syiah, dan Khawarij yang terus berkembang dalam sejarah Islam hingga masa kini.

Dengan demikian, Perang Shiffin bukan sekadar konflik bersenjata antara dua tokoh sahabat Nabi, melainkan titik awal dari keretakan besar dalam tubuh umat Islam. Ia menjadi cermin bahwa idealisme ukhuwah Islamiyah dapat runtuh jika dihadapkan pada kepentingan politik dan kekuasaan tanpa adanya mekanisme penyelesaian yang adil, transparan, dan disepakati bersama. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perang ini penting bukan hanya dari segi sejarah, tetapi juga sebagai pelajaran untuk menegakkan prinsip keadilan, persatuan, dan kearifan dalam mengelola perbedaan di tengah umat. Memahami dampak Perang Shiffin secara komprehensif merupakan langkah penting untuk merekonstruksi sejarah Islam yang adil dan mendorong semangat rekonsiliasi antar kelompok dalam tubuh umat Islam masa kini.

Daftar Pustaka

- Abdul Fatah, 'Perang Shiffin dan Dampaknya terhadap Perpecahan Politik Umat Islam', *Jurnal Adabiyah*, Vol. 15.No.2 (2015) <https://doi.org/https://digilib.uin-suka.ac.id/1641/?utm_>.
- Audah, Ali, *Ali Bin Abi Thalib (Sampai Kepada Hasan Dan Husain)*, VII (Litera AntarNusa, 2010).
- Asy-Syahrastani, *Al-Mihal Wa Al-Nihal Terj. Asywadie Syukur* (PT. Bina Ilmu Offset, 2006).
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad, *Muawiyah Bin Abu Sufyan Terj. Izzudin Karimi*, 1st ed. (Darul Haq, 2012).
- Al-Usairy, Ahmad, *Al-Tarikhu Islam Terj. H. Samson Rahman, Sejarah Islam*, 11th ed. (Akbar Media, 2012).
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Brata, Yat Rospia, 'Perang Shiffin', *Jurnal Artefak*, 3.1 (2015), h. 85-95.
- Dasuki, Akhmad, Muhammad Samman, 'Tafsir Ekatrek Kaum Khawarij Ketika Ayat Suci Dijadikan Alat Takfir', *Journal Sains Student Research*, 3.4 (2025), 158-70 <<https://doi.org/10.61722/JSSR.V3I4.5261>>.
- Hariyanto, Muhsin, and Mahfud Khoirul Amin, 'Muslim Political Dynamics Post-Tahkim: A Case Study of the Shiffin War', *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5.9 (2024), 3782-92 <<https://doi.org/10.59141/jist.v5i9.1734>>.
- Haekal, Muhammad Husain, *Usman Bin Affan Terj. Ali Audah*, 9th ed. (Litera AntarNusa, 2010).
- Hitti, Philip K., *History of Arabs* Terj. R. Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi, 2nd ed. (PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010).
- Lathif, Abdussyafi Muhammad Abdul, *Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah Terj. Masturi Irham Dan Malik Supar*, 1st ed. (Pustaka Al-Kautsar, 2014).
- Katsir, Ibnu, *Bidayah Wa Nihayah Terj. Asmuni* (Pustaka Azzam, 2014).
- Karim, M. Abdul., *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Pustaka Book Publisher, 2007).
- Misbahuddin, and Usman Nomay, *Sejarah Islam Klasik (571-1258 M)* (Jakarta: Sejahtera Kita, 2021).
- Muhammad Iqbal, 'Krisis Politik pada Masa Khalifah Utsman Bin Affan dan Dampaknya Terhadap Konflik Umat Islam', *Analytica Islamica*, Vol. 6.No. 2 (2017).
- M., M. Amin Nurdin, *Sejarah Pemikiran Islam* (Amzah, 2011).
- Nasution, Syamruddin, *Sejarah Peradaban Islam* (Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013).
- Puadi, Hairul, 'Radikalisme Islam: Studi Doktrin Khawarij', *JURNAL PUSAKA: Media Kajian Dan Pemikiran Islam*, 4.1 (2016), 43-53 <<https://doi.org/10.35897/PS.V4I1.49>>.
- Rahayu, Fitri, Afrizal Afrizal, and Syawaluddin Syawaluddin, 'Transformasi Politik Pasca Khalifahan: Studi Atas Peran Muawiyah Ibn Abi Sofyan Dalam Pembentukan Dinasti', *AL-USWAH: Jurnal Riset Dan Kajian Pendidikan Agama Islam*, 8.1 (2025), 1-10 <<https://doi.org/10.24014/AU.V8I1.37324>>.
- Sabli, Muhammad, 'ALIRAN-ALIRAN TEOLOGI DALAM ISLAM (Perang Shiffin Dan Implikasinya Bagi Kemunculan Kelompok Khawarij Dan Murjiah)', *Nur El Islam*, 2.1 (2015), 105-12 <<https://media.neliti.com/media/publications/226415>>.

- aliran-aliran-teologi-dalam-islam-perang-3369cd4a.pdf>.
- Selviana, Syukur, Syamzan, 'Latar Belakang Terjadinya Perang Jamal dan Perang Shiffin Pada Masa Ali Bin Abi Thalib', *Jurnal Global Islamika*, 3.1 (2024), 1-11 <<https://doi.org/10.5281/ZENODO.12597874>>.
- Sulastri, 'Konsep Pemahaman Aqidah Khawarij dari Zaman Ke Zaman', *Maslahah: Jurnal of Islamic Studies*, 1.2 (2022), 103-11 <<https://jurnalsains.id/index.php/maslahah/article/view/51>>.
- Sumari, Ahmad, Nur Ainul Basyirah Alias Jabatan Pengajian Islam, and Fakulti Sains Kemanusiaan, 'Isu dan Kontroversi Perang Jamal dan Perang Siffin: Suatu Tinjauan Literatur', *AL-MAKRIFAH Journal of Knowledge and Learning in Islamic Tradition and Culture*, 3.1 (2025), 44-53 <<https://doi.org/10.37134/ALMAKRIFAH.VOL3.1.4.2025>>.
- Yatim, Badri, *Sejarah Politik Islam: Dari Perang Shiffin Hingga Fitnah Besar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000).